

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pendidikan Demokrasi dalam Perspektif Nahdlatul Ulama” yang dilakukan oleh PWNU, yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi serta mengacu pada referensi dari pendapat para ahli yang relevan, maka kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. PWNU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Islam terbesar di Jawa Barat pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya berperan dalam mensosialisasikan gagasan maupun praktik demokrasi. NU tidak menolak demokrasi, akan tetapi pada pelaksanaannya jalannya demokrasi mesti ditunjang oleh kemampuan pengisi demokrasi yang kompeten. nilai-nilai demokrasi dalam perspektif NU telah tercermin dalam lima sikap kemasyarakatan NU, yakni pertama *tawazun* (serasi, selaras, seimbang), kedua *tawassuth* (NU bersikap moderat tidak sebaliknya tathoruf/ekstrem), ketiga *tasamuh* (toleran), keempat *i'tidal* (adil) dan kelima *amar'ma'ruf nahi munkar*.
2. Dalam praktiknya, PWNU telah melaksanakan pendidikan demokrasi yang dapat terdeskripsikan dalam kegiatan yang telah dilakukan, yakni *pertama*

**Ridwan Fauzi, 2012**

**Pendidikan Demokrasi Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama**

: Studi Kasus di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Cendekiawan Nahdhiyin

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pelaksanaan Konferensi Wilayah Jawa Barat, *kedua* Pelatihan bagi pengurus cabang NU se Jawa Barat (TOT), *ketiga Bahtsul Masail* yang dilakukan PWNU, *keempat*, pengajian *Lailatul Ijtima*, *kelima*, kajian-kajian kekinian, *keenam*, menyuarkan antikorupsi, dan *ketujuh*, turut berperan dalam pesta demokrasi.

3. Cara yang dilakukan PWNU dalam melaksanakan pendidikan demokrasi terbagi kedalam dua, *pertama*, secara formal, yakni melalui program yang dilakukan secara struktural dari PWNU sendiri, *kedua*, nonformal, yakni melalui kegiatan yang secara tidak berdasar struktural PWNU, yakni pendekatan ibadah dan budaya yang dilakukan oleh Ulama, Ustadz NU. Seperti Teladan, kegiatan ibadah ke Nu an, seperti Haul, peringatan hari besar islam, Marhaba, Tahlil, Sholawat, Manakib, Istigotsah dan lainnya.
4. Media yang digunakan NU dalam melakukan pendidikan demokrasi adalah organisasi NU sendiri yang dimana dalam hal ini adalah PWNU. Secara struktural sebagai organisasi NU terbesar di Jawa Barat yang membawahi organisasi NU di bawahnya. Dalam PWNU terdapat lembaga, Badan Otonom yang membantu melakukan pendidikan demokrasi secara teknis. Lembaga dan badan tersebut yang selama ini konsen dalam menyebarkan wawasan demokrasi adalah Lakpesdam (Lembaga pemberdayaan sumber daya manusia), LBM (Lembaga Bahtsul Masail), Muslimat NU, GP Anshor, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Ikatan Sarjana NU, Persatuan

**Ridwan Fauzi, 2012**

**Pendidikan Demokrasi Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama**

: Studi Kasus di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Cendikiawan Nahdliyin

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Guru NU, Lembaga Dakwah NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU. Kemudian media yang digunakan pula yakni ceramah dalam kegiatan beberapa pengajian, seminar, diskusi. Selain itu pula melalui sejumlah buku yang ditulis dan terakhir media internet (website PWNNU Jawa Barat).

## B. Rekomendasi

1. Konsistensi PWNNU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Jawa Barat, yang mengayomi pengurus cabang di bawahnya, dalam melakukan pendidikan demokrasi, mesti lebih ditingkatkan kembali, sebagaimana salah satu tugas NU terhadap masyarakat untuk membumikan nilai-nilai atau gagasan demokrasi sebagaimana tersosialisasinya nilai-nilai yang terangkum dalam lima sikap kemasyarakatan NU, yakni *tawazun* (serasi, selaras, seimbang), *tawassuth* (NU bersikap moderat tidak sebaliknya *tathoruf/ekstrem*), *tasamuh* (toleran), *i'tidal* (adil) dan *amar'ma'ruf nahi munkar* atau visi NU dalam membentuk masyarakat yang *mutamaddun* (*civil society*).
2. PWNNU sebagai organisasi yang independen, senantiasa terus melakukan pengawasan, bersikap kritis dan seimbang terhadap segala kebijakan pemerintah dan tidak memposisikan diri sebagai organisasi yang cenderung *muqolid ala shulthon* (terlalu dekat dengan penguasa) yang

**Ridwan Fauzi, 2012**

**Pendidikan Demokrasi Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama**

: Studi Kasus di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Cendekiawan Nahdliyin

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

akan berdampak terhadap kekritisian terhadap pemerintah. Sebagaimana amanat Khittah NU 1926 hasil keputusan muktamar.

3. Ulama NU sebagai *central figure* masyarakat, senantiasa konsen terhadap tugas ke Ulama-annya yang menjadi benteng aktif membina, mendidik, mengayomi, dan mengawal umat dalam proses kehidupan, khususnya dalam hal pendidikan demokrasi.
4. Pemerintah senantiasa mendukung peran organisasi masyarakat yang melakukan pendidikan demokrasi sebagaimana sejalan dengan tugas pemerintah dalam hal sosialisasi gagasan dan praktik demokrasi, sebagaimana yang dilakukan oleh NU.
5. Generasi muda NU harus senantiasa memiliki wawasan luas dengan meminimalisir sikap dan pendapat yang jumud (tertutup). Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya sikap saling mencela, merasa diri paling benar tanpa argumentasi yang kuat dan jelas.



**Ridwan Fauzi, 2012**

**Pendidikan Demokrasi Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama**

: Studi Kasus di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Cendekiawan Nahdliyin

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)